

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG
PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA
DI SD NEGERI 173198 PANSURNA TOLU,
TAPANULI UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

AYU WANDIRA NAINGGOLAN

NPM : 1403100137

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **AYU WANDIRA NAINGGOLAN**
N P M : 1403100137
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, tanggal : Kamis, 15 Maret 2018
Waktu : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, SH., MM** (.....)
PENGUJI II : **ARIFIN SALEH, Dr., M.SP** (.....)
PENGUJI III : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. RUDIANTO, M.Si



Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

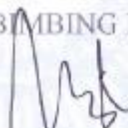
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : AYU WANDIRA NAINGGOLAN
N P M : 1403100137
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA DI SD NEGERI 173198 PANSURNATOLU TAPANULI UTARA

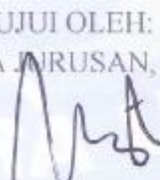
Medan, 03 Maret 2018

PEMBIMBING I



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DISETUJUI OLEH:
KETUA JURUSAN,



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd



DEKAN

Dr. RUDIANTO, M.Si

PERNYATAAN

Bismillaahirrahmaanirrahim

Dengan ini saya, **AYU WANDIRA NAINGGOLAN**, NPM : 1403100137 menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

g menyatakan,



Ayu wandira Nainggolan



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Ayu Wandira Nainggolan
NIM : 1403100137
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di SD Negeri 173198 Pansurmatolu, Kabupaten Uluwu

Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
03-02-2018	Perbaiki Narasi Pada Halaman Yang sesuai Arahkan Lampirkan Daftar Wawancara.	
05-02-2018	Perbaiki Pada Bab II Uraian Teoritis Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik	
09-02-2018	Tambahkan Pada Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Deskripsi Narasumber, Lokasi Penelitian, dan hasil wawancara.	
13-02-2018	Perbaiki Narasi Pada Bab IV tentang Pembahasan hasil wawancara.	
21-02-2018	Perbaiki Narasi Pada Abstrak - Tambahkan Tabel dan Gambar di Bab IV	
24-02-2018	Tambahkan kesimpulan sementara di tiap-tiap Kategorisasi Pada Bab IV	
27-02-2018	Perbaiki Narasi Pada Kesimpulan dan Saran	
03-03-2018	All Group Kumpulkan	

Medan, 03 Maret 2018

Dekan,

(..... M. Si.....)

Ketua Program Studi,

(Naili Khairiah, S.P., M.Pd)

Pembimbing ke : I..

(Naili Khairiah, S.P., M.Pd)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA DI SD NEGERI 173198 PANSURNATOLU

AYU WANDIRA NAINGGOLAN

1403100137

Pendidikan Agama menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan peraturan menteri agama nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah di SD Negeri 173198 Pansurnatolu. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu tidak tersedianya tenaga pendidik mata pelajaran agama Islam serta kurangnya sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan agama.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian sebanyak 6 (enam) orang antara lain adalah Kepala Sekolah, Tata Usaha, 2 (dua) orang guru SD Negeri 173198 dan 2 (dua) orang tua siswa yang memiliki anak di SD Negeri 173198.

Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah belum dilaksanakan dengan baik dan menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut belum sesuai dengan yang diamanatkan dikarenakan kurangnya kuantitas tenaga pendidik khususnya kelompok mata pelajaran agama Islam sertatidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan ke pihak-pihak sekolah. Dan dari pihak sekolah belum ada melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait sehingga tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut sulit untuk dicapai.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia_Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam pencapaian gelar sarjana Program Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Berkat usaha dan doa akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih ada kekurangan. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini bukan hanya bersandar pada kemampuan penulis tetapi tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu sudah sepantasnya penulis memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih terutama kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda **Al-bagora Nainggolan** dan Ibunda **Jerni Gultom** yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan moril dan materi yang tidak pernah lelah mendoakan penulis dalam setiap sujud mereka.

Selain kedua orang tua penulis juga mengucapkan terimakasih yang tidak bertepi kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Dr. Rudianto, M.Si selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip. M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip., M.Pd selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan fikirannya dalam memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf-staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Sahat Simanjuntak selaku Kepala SD Negeri 173198 Pansurnatolu, Tapanuli Utara dan guru-guru di SD Negeri 173198 Pansurnatolu yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang berkaitan dalam penelitian ini.
7. Abang saya Eddi Sofian Nainggolan dan Gunawan Nainggolan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Adik saya satu-satunya Windi Rahmawati Nainggolan yang tiada hentinya memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar saya yang tiada hentinya memberikan dukungan mulai dari perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi.
10. Sahabat saya Siti Fatimah Rambe, Hildayanti Azizah Zega, Nelly, M.Daud Yusuf Siregar, M.Taher Siregar, Ibrahim Jakpar Hrp, Maradingin

Siregaryang selalu membangkitkan semangat dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman se-Almamater khususnya stambuk 2014 yang selalu membangkitkan semangat dan memberikan ide serta fikirannya dalam penulisan ini sehingga dapat selesai tepat pada waktunya.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari pada kesalahan dan kekurangan, maka dari itu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenaan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Medan, Maret 2018

Penulis,

Ayu Wandira Nainggolan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang Masalah	1
B. PembatasanMasalah	5
C. RumusanMasalah	5
D. Tujuan dan ManfaatPenelitian	5
E. SistematikaPenulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	8
A. Implementasi Kebijakan Publik	8
1. Pengertian Implementasi.....	8
2. Pengertian Kebijakan.....	10
3. Pengertian Kebijakan Publik.....	11
4. Karakteristik Kebijakan Publik	13
5. Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Keputusan Kebijakan	13
6. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	15
7. Unsur-Unsur Kebijakan Publik	16
8. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik.....	17

9. Pendekatan Implementasi	19
B. Konsep Pendidikan Agama	21
1. Pengertian Pendidikan Agama	21
2. Fungsi Pendidikan Agama	24
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan Agama.....	26
4. Pengelolaan Pendidikan Agama.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Teknik Pengumpulan Data	32
C. Teknik Analisis Data	33
D. Kategorisasi	36
E. Kerangka Konsep	37
F. Defenisi Konsep	38
G. Narasumber	39
H. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	40
I. Deskripsi Lokasi Penelitian	40
1. Sejarah Singkat SD Negeri 173198 Pansurnatolu	40
2. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah.....	44
3. Struktur Organisasi SD Negeri 173198 Pansurnatolu	48
4. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Penyajian Data	65

1. Deskripsi Narasumber.....	65
2. Deskripsi SD Negeri 173198 Pansurnatolu	68
3. Deskripsi Hasil Wawancara	69
B. Pembahasan.....	86
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 3.1 KerangkaKonsep.....	37
GAMBAR 3.2 BaganStrukturOrganisasi SD Negeri 173198 Pansurnatolu....	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 3.1 Jadwal Kegiatan SD Negeri 173198 Pansurnatolu	42
TABEL 3.2 Status SekolahDasarNegeri 173198 Pansurnatolu.....	43
TABEL 3.3 PihakPengajar/ KetenagaanSekolahMenurutGolongan.....	43
TABEL 4.1 Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
TABEL 4.2 Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan	66
TABEL 4.3 Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur.....	67
TABEL 4.4 Kondisi Narasumber Berdasarkan Golongan	68
TABEL 4.5 Fasilitas Sekolah Yang Ada Di SDNegeri 173198 Pansurnatolu ..	69
TABEL 4.6 Sarana SD Negeri 173198 Pansurnatolu.....	69
TABEL 4.7 DataSiswaBerdasarkan Agama	69

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran II : Daftar Jawaban Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran IX : Surat Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran X : Surat Keterangan Penelitian Dari SD Negeri 173198
Pansurnatolu
- Lampiran XI : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Pendidikan merupakan upaya yang sangat luhur dalam meningkatkan kualitas manusia, sehingga segala usaha yang mengarah pada keberhasilan pendidikan merupakan sebuah keharusan. Pendidikan yang bermutu adalah ketika peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan dalam dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang dilakukan secara sadar dan terencana (UU RI No. 20 tahun 2003 Tentang SISDIKNAS). Untuk itu, penyelenggaraan pendidikan perlu diatur demi kelangsungan dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Dengan demikian pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara formal. Selain itu, berdasarkan kebijakan peraturan pemerintah tersebut pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa.

Oleh sebab itu untuk mencapai spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan peserta didik dikuatkan dengan terbitnya peraturan menteri agama republik indonesia nomor 16 tahun 2010,

yang menyatakan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Sekolah adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mencakup TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK. Selain itu, pendidikan agama menurut peraturan menteri agama tersebut adalah sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama dan setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (pasal 3).

Untuk memenuhi tujuan pendidikan agama paling tidak harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 2005 yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

SD Negeri 173198 Pansurnatolu adalah salah satu SD Negeri di Tapanuli Utara yang masih memiliki akreditasi B. Dengan demikian tiap-tiap sekolah jika sudah memenuhi standar maka pendidikan agama terlaksana dengan baik di sekolah. Namun, pelaksanaan pendidikan agama yang sesuai dengan standar masih terbilang kurang di beberapa sekolah di Tapanuli Utara seperti standar proses pembelajaran, hal ini terlihat dari tidak adanya proses mengajar agama Islam dalam bentuk tatap muka di dalam kelas. Standar pendidik dan tenaga

kependidikan juga merupakan salah satu standar yang bermasalah di salah satu SD di Tapanuli Utara tampak dari tidak adanya guru agama Islam di sekolah tersebut. Selain itu, standar sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan peraturan menteri agama nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah.

Agama Islam merupakan agama yang minoritas di Tapanuli Utara. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel di bawah ini :

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Populasi Kristen	Agama		
				Kristen Protestan	Kristen Katolik	Islam
1	2016	279.257 jiwa	264. 806 jiwa	251. 991 jiwa	12.815 jiwa	13.301 jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016

Dari jumlah penduduk di atas, dapat dilihat persentase populasi agama Kristen di Tapanuli Utara adalah 94,82% sedangkan agama Islam hanya 5,18% saja. Oleh sebab itu, pendidikan agama Islam sangat penting untuk membina mental, moral, akhlak sesuai dengan agama Islam.

Namun ada beberapa kekurangan dalam penyelenggaraan pendidikan agama seperti : a) Guru. Di salah satu SD yang berada di Tapanuli Utara terdapat kekurangan pemenuhan jumlah guru agama Islam, padahal salah satu komponen penting dalam dunia pendidikan adalah guru. Hal ini disebabkan gurulah yang berada dibarisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. b) lingkungan masyarakat. Di Pansurnatolu agama non muslim merupakan agama mayoritas hal ini dapat mempengaruhi pendidikan agama di sekolah tampak dari kurangnya perhatian sekolah dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam. c)

Sarana dan prasarana yang belum terpenuhi sesuai standar pendidikan nasional seperti tidak tersedianya tempat ibadah, perpustakaan, media pembelajaran, serta laboratorium pendidikan agama. Karena itu, siswa hanya disuguhkan pengetahuan kognitif saja untuk afektif dan psikomotoriknya tidak terpenuhi.

Oleh karena itu, dengan terbitnya peraturan menteri agama mengenai pengelolaan pendidikan agama pada sekolah untuk menjamin pengelolaan pendidikan agama yang bermutu di sekolah. Karena menurut Shaleh (2000:31) keberhasilan pengelolaan pendidikan agama dapat dilihat dari beberapa aspek yakni, pendidikan agama dapat terlaksana pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, kurikulum pendidikan agama dapat dimiliki, dipahami, dan dilaksanakan di semua sekolah, guru agama disediakan mencukupi keperluan serta memahami wawasan kependidikan dan kemampuan profesional, sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pendidikan agama disediakan di sekolah secara merata, petugas supervisi pendidikan agama (pengawas agama) memiliki wawasan dan kemampuan profesional dalam tugasnya membina dan mengarahkan guru agama, dan terbina kerjasama secara harmonis, baik vertikal, horizontal, maupun diagonal baik intern maupun ekstern.

Dengan adanya masalah yang dihadapi saat ini tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah seperti yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **Pengelolaan Pendidikan Agama dengan judul: “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama di SD Negeri 173198 Pansurnatolu, Tapanuli Utara”**.

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan Pengelolaan Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 173198 Pansurnatolu, Tapanuli Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah peneliti ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama di SD Negeri 173198 Pansurnatolu, Tapanuli Utara.”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama di SD Negeri 173198 Pansurnatolu, Tapanuli Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada SD Negeri 173198 Pansurnatoludalam penyelenggaraan pendidikan agama
- c. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan peraturan menteri agama republik indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan agama di SD Negeri 173198 Pansurnatolu.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini terdiri dari Pengertian Kebijakan Publik, Karakteristik Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Unsur-Unsur Kebijakan Publik, Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik, Pendekatan Implementasi Kebijakan, Pengertian Pendidikan Agama, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan Agama

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber Dan Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atau permasalahan yang akan diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi

Menurut Sugandi (2011:88) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Menurut Wahab (2005:135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Winarno (2012:146) Implementasi merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai tujuan atau dampak yang diinginkan.

Menurut Susilo (2007:174) menyatakan implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Menurut Agustino (2008:139) implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau

kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri

Menurut Randaal dan Grace (dalam Winarno, 2012:148) implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat untuk membuat program berjalan. Dan menurut mereka implementasi mencakup banyak kegiatan:

- a. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang tanggungjawab program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasinya berjalan lancar, sumber-sumber ini meliputi personil peralatan, bahan tanah, bahan-bahan mentah dan uang.
- b. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan kongkret, regulasi serta rencana-rencana dan desain program.
- c. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.
- d. Dan terakhir yaitu badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan tentang kegiatan lainnya yang bias dipandang sebagai wujud dan keluaran yang nyata dari suatu program.

Dari berbagai defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi sesuatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya.

2. Pengertian Kebijakan

Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Dunn (2003:20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan pengadilan kriminalitas dan pembangunan perkotaan

Menurut Woll dalam Tangkilisan (2003:2) kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Widodo (2011:97) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Menurut Miriam Budiardjo (2000:56) kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat.

3. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Syafiie (2006:104) kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Menurut Friedrich dalam Agustino (2008:7) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Abidin (2012:07) kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah sehingga salah satu ciri kebijakan “*whatever government choose to do or not to do*” kebijakan dari pemerintahlah yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Menurut Agustino (2006:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi)

tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Menurut Dunn dalam Syafiie (2006:106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan, maka Islamy (2009:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- a. Kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah
- b. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata
- c. Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
- d. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Dari uraian diatas kebijakan publik diatas dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, tindakan atau

perbuatan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tidaklah efektif.

4. Karakteristik/ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Wahab (2014:20) kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah mempunyai beberapa karakteristik kebijakan yaitu:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sengaja yang dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu dari pada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (at random), asal-asalan, dan serba kebetulan.
- b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif.

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Keputusan/Kebijakan

Menurut Islamy (2009:25) beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan antara lain:

- a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Administrator sebagai pembuat keputusan bukan hanya mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian

“rasional” semata, tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar itu ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusannya.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)

Kebiasaan lama organisasi (Nigro menyebutnya, dengan istilah “*sunk costs*”) seperti kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu seringkali digunakan untuk membiayai program-program tertentu, cenderung akan selalu dikuati kebiasaan itu oleh para administrator. Kebiasaan-kebiasaan lama tersebut seringkali diwarisi oleh para administrator yang baru dan mereka sering segan secara terang-terangan mengkritik administrator sebelumnya.

c. Adanya pengaruh sifat- sifat pribadi

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuat keputusan. Seringkali pembuat keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada diluar bidang pemerintahan.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Pengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaan terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan, seperti administrator tidak melimpahkan bagian wewenangnya pada orang lain karena khawatir disalahgunakan. Atau juga orang-orang yang bekerja di kantor pusat sering

membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan dan sebagainya.

6. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Winarno (2012:102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Widodo (2011:98) mengemukakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Menurut Mustopadidjaya (2002:112) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai “to provide the means for carryng out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give pratical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses yang dilakukan setelah kebijakan telah diterapkan dengan tujuan mengatasi suatu permasalahan yang muncul dalam suatu kebijakan dan adanya proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah ketetapan ditetapkan dan disetujui.

7. Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses akan terdapat tahapan-tahapan identifikasi masalah dan tujuan, formulasi akan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Menurut Abidin (2012:25) jika dilihat dari struktur terdapat limaunsur kebijakan, yaitu:

a. Tujuan kebijakan.

Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.

b. Masalah (*problem*)

merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar.

c. Tuntutan (*demand*)

Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.

d. Dampak (*outcome*)

Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.

e. Sarana dan alat kebijakan (*policy instruments*)

Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa dari sarana ini antara lain, kekuasaan, insentif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

8. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edward dalam Mulyadi (2016:28) mengajukan 4 (empat) variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup).

b. Sumber daya

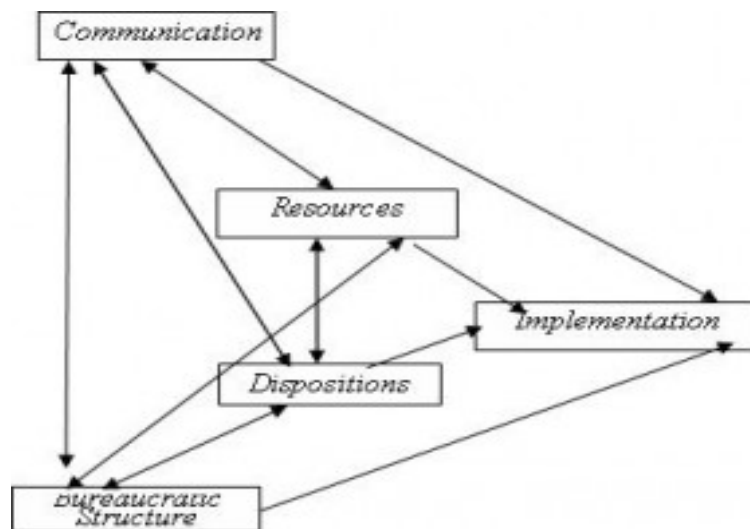
Sumber daya menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya financial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.

d. Struktur Birokrasi

Aspek struktur organisasi memiliki dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah memiliki *Standar Operation Procedur* (SOP). SOP merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak lari dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.



Sumber : Mulyadi, studi kebijakan public dan pelayanan public. 2016:69

9. Pendekatan- Pendekatan Implementasi

Wahab (2014:234) mendasari beberapa tipe pendekatan implementasi yaitu:

a. Pendekatan-Pendekatan Struktural (*Structural Approaches*)

Implementasi dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis atau persoalan manajerial. Secara umum, dapat dikatakan bahwa struktur yang bersifat organis tampaknya agak cocok untuk situasi-situasi implementasi, dimana perlunya merancang bangun struktur yang mampu melaksanakan suatu kebijakan yang senantiasa berubah, bila dibandingkan dengan merancang bangun struktur khusus untuk program yang sekali selesai.

b. Pendekatan-Pendekatan Procedural Dan Manajerial (*Procedural And Managerial Approaches*)

Pendekatan ini mengasumsikan adanya tingkat kemampuan pengawasan yang sangat tinggi atas pelaksanaan dan hasil akhir suatu program, dan dianggap

terisolasi dari pengaruh lingkungan. Teknik manajerial yang merupakan perwujudan dari pendekatan ini ialah perencanaan jaringan kerja dan pengawasan network *Planning and Control* (NPC) yang menyajikan suatu kerangka kerja proyek yang dapat direncanakan, dan implementasinya dapat diawasi dengan cara mengidentifikasi tugas-tugas yang harus diselesaikan, hubungan diantara tugas-tugas tersebut, dan urutan-urutan logis di mana tugas-tugas itu harus dilaksanakan.

c. Pendekatan-Pendekatan Keprilakuan (*Behavioral Approaches*)

Perilaku manusia beserta segala sikapnya harus pula dipengaruhi kalau kebijakan ingin dapat diimplementasikan dengan baik. Pendekatan keprilakuan diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan (*resistance to change*). Tujuan pendekatan ini untuk menciptakan suasana saling percaya, terutama dengan pihak pimpinan menunjukkan perhatian yang besar terhadap kepentingan orang-orang dan terhadap perasaan mereka yang kurang jelas.

d. Pendekatan-Pendekatan Politik (*Political Approaches*)

Implementasi suatu kebijakanyang telah direncanakan dengan seksama, baik dilihat dari sudut organisasinya, prosedurnya, manajemennya, dan pengaruh-pengaruhnya pada perilaku, tetapi jika ia tidak atau kurang memperhitungkan realita-realita kekuasaan, maka mustahil kebijakan tersebut dapat berhasil.

B. Konsep Pendidikan Agama

1. Pengertian Pendidikan Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pendidikan agama terdiri dari dua kata berbeda, yaitu “pendidikan” dan “agama”. Pendidikan berasal dari kata “didik” yang diberi awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses, perbuatan, dan cara mendidik.

Bila sebagian masyarakat awam, istilah pendidikan sering diidentikkan dengan “sekolah” guru mengajar di “kelas”, atau “satuan pendidikan formal” belaka. Secara akademik istilah pendidikan berspektrum luas. Pendidikan adalah aktivisasi semua potensi dasar manusia melalui interaksi antara manusia dewasa dengan yang belum dewasa. Pendidikan adalah proses kemanusiaan dan pemanusiaan sejati, dengan atau tanpa penyengajaan.

Menurut Danim (2011:4) Pendidikan pada intinya merupakan proses penyiapan subyek didik menuju manusia masa depan yang bertanggungjawab. Kata “bertanggungjawab” mengandung makna, bahwa subyek didik dipersiapkan untuk menjadi manusia yang berani berbuat dan berani pula bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menurut Asy-Syaibani dalam Umar (2010:27) pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku individu, pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat

Menurut Jamali dalam Umar (2010;28) pendidikan agama islam adalah upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan.

Menurut Daradjat dalam Majid (2005:130) pendidikan agama merupakan usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik supaya kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama serta menjadikannya sebagai *way of life*.

Azizy dalam Majid (2005:131) mengemukakan bahwa esensi pendidikan yaitu adanya proses transfer nilai, pengetahuan, dan keterampilan dari generasi tua kepada generasi muda agar generasi muda mampu hidup. Oleh karena itu pendidikan agama Islam mencakup dua hal, (a) mendidik siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam; (b) mendidik siswa-siswi untuk mempelajari materi ajaran Islam- subyek berupa pengetahuan tentang ajaran Islam.

Dari beberapa pengertian tersebut dikatakan bahwa pendidikan Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspek. Pengertian tersebut mempunyai lima prinsip pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Proses transformasi dan internalisasi yaitu upaya pendidikan islam harus dilakukan secara bertahap, berjenjang, dan kontinu dengan upaya

pemindahan, penanaman, pengarahan, pengajaran, pembimbingan sesuatu yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terstruktur dengan menggunakan pola dan sistem tertentu.

- b. Ilmu pengetahuan dan nilai-nilai, yaitu upaya yang diarahkan pada pemberian dan penghayatan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai.
- c. Pada diri anak didik, yaitu pendidikan diberikan kepada anak didik yang mempunyai potensi-potensi rohani.
- d. Melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya yaitu tugas pokok pendidikan agama hanyalah menumbuhkan, mengembangkan, memelihara dan menjaga potensi laten manusia agar ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan, minat dan bakatnya.
- e. Guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya, yaitu tujuan akhir dari proses pendidikan Islam adalah terbentuknya “Insan Kamil”

Sasaran pendidikan agama pada anak-anak adalah kepribadiannya. Pendidikan agama berusaha mengarahkan kepada pembentukan kepribadian anak-anak sesuai dengan ajaran agama. Pendidikan agama dilakukan dengan usaha-usaha sistematis dan pragmatis dalam membantu anak-anak agar hidup sesuai dengan ajaran agamanya. Oleh karena itu, pendidikan agama berkisar pada dua dimensi kehidupan manusia, yaitu penanaman rasa taqwa kepada Allah dan pengembangan rasa kemanusiaan kepada sesama. Rasa taqwa kepada Allah dimulai dengan kewajiban-kewajiban formal agama. Jiwa taqwa akan berkembang

dengan menghayati keagungan dan kebesaran Tuhan melalui rasa perhatian kepada alam semesta beserta segala isinya, dan lingkungan sekitarnya. Disamping itu pendidikan agama bagi anak-anak dilihat dari dimensi kemanusiaan ialah seberapa jauh tertanam nilai-nilai keagamaan dalam jiwa anak, serta seberapa jauh nilai-nilai itu berwujud nyata dalam tingkah laku dan budi pekerti.

Terkait performa dan kepribadian peserta didik sebagai sosok yang dinamik, maka secara totalitas karakternya merupakan hasil keterpaduan empat bagian yaitu olah hati berkenaan dengan perasaan sikap dan keyakinan/keimanan; olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, inovatif; olahraga berkenaan dengan proses persepsi, persiapan peniruan manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas; olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, pencitraan, dan penciptaan. Pendidikan karakter hakikatnya bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional, yang meliputi: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan sosial, dan tanggungjawab.

2. Fungsi Pendidikan Agama Islam

Kurikulum pendidikan agama Islam untuk sekolah/madrasah berfungsi sebagai berikut:

- a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada

dasarnya kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sedangkan sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan.

- b. Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
- c. Penyesuain mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam
- d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengamalan ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
- f. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem dan fungsionalnya.
- g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama islamagar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan Agama

Menurut Hasbullah dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan agama yaitu:

a. Faktor Pendidik

Pendidik adalah orang yang memikul tanggungjawab untuk mendidik. Jadi sebenarnya seseorang disebut pendidik itu karena memiliki peran serta tanggung jawab terhadap peserta didik untuk dapat mendidik seorang anak.

b. Faktor Anak Didik

Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan.

c. Tujuan Pendidikan

Menurut Dr.Zakiah Daradjat,dkk. Tujuan pendidikan ialah sesuatu yang hendak dicapai dengan kegiatan atau usaha pendidikan. Bila Pendidikan itu berbentuk pendidikan formal, tujuan pendidikan itu harus tergambar dalam suatu kurikulum.

d. Faktor Alat Pendidikan

Adapun yang dimaksud dengan alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Dengan demikian yang dimaksud dengan alat pendidikan agama berupaperbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang secara konkrit dan tegas dilaksanakan, guna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dan berhasil.

e. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan sesuatu yang mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Adapun pengaruh lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh lingkungan dapat dikatakan positif, bila mana lingkungan itu dapat memberikan dorongan atau motivasi dan rangsangan kepada anak untuk berbuat hal-hal yang baik.
2. Sebaliknya pengaruh lingkungan dapat dikatakan negatif bila mana keadaan sekitarnya anak itu tidak memberikan pengaruh baik.

4. Pengelolaan Pendidikan Agama

Menurut peraturan menteri agama nomor 16 tahun 2010, pengelolaan pendidikan agama pada sekolah diselenggarakan dalam menjamin pengelolaan pendidikan agama yang bermutu di sekolah. Sehingga dengan adanya pengelolaan pendidikan agama maka negara secara langsung mewajibkan setiap sekolah yang ada di wilayah negara Indonesia untuk patuh dan taat terhadap ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh menteri agama, pengelolaan pendidikan agama berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan agama.

Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah terdiri dari beberapa kriteria yaitu :

a. Standar Isi

Standar isi pendidikan agama merupakan standar minimal yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai acuan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

b. Kurikulum

Kurikulum pendidikan agama disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum pendidikan agama dikembangkan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya lingkungan sekolah dan daerah. Selain itu, sekolah dapat menambah muatan kurikulum pendidikan agama berupa penambahan dan/atau pendalaman materi, serta penambahan jam pelajaran sesuai kebutuhan.

c. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran pendidikan agama dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Proses pembelajaran intrakurikuler pendidikan agama meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan untuk terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien. Selain itu, proses pembelajaran pendidikan agama dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai sumber dan media belajar yang dapat mendorong pencapaian tujuan pendidikan agama.

d. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulus digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri untuk mengikuti pendidikan yang lebih lanjut.

e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru pendidikan agama minimal memiliki kualifikasi akademik Strata 1/Diploma IV, dari program studi pendidikan agama dan/atau program studi

agama dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat profesi guru pendidikan agama. Pengadaan guru pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam hal di suatu wilayah tidak terdapat guru pendidikan agama, Pemerintah dapat menugaskan pembina pendidikan agama untuk mengajar pendidikan agama di sekolah.

f. Standar Pengawas

Pengawas pendidikan agama bertugas melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya pendidikan agama pada sekolah yang meliputi penilaian, pembinaan, pemantauan, penelitian, pelaporan dan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama sesuai dengan standar nasional pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan agama dan tujuan pendidikan nasional.

g. Standar Sarana dan Prasarana

Setiap sekolah wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan agama antara lain, sumber belajar, tempat ibadah, media pembelajaran, perpustakaan, dan laboratorium pendidikan agama.

h. Standar Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas:

- a. Sarana dan prasarana pendidikan agama
- b. Kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler pendidikan agama
- c. Insentif dan tunjangan guru dan pengawas pendidikan agama

d. Bantuan biaya operasional organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan agama.

i. Standar Penilaian Hasil Belajar

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:

- Penilaian hasil belajar oleh pendidik
- Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
- Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

j. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk menjamin mutu pengelolaan pendidikan agama. Evaluasi dilaksanakan terhadap standar isi, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan penilaian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Darmadi (2014:287) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Demikianlah menurut Darmadi (2014:36) sumber data penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).

Penelitian deskriptif digunakan untuk:

- 1) Mengumpulkan informasi aktual secara rinci dengan melihat gejala yang ada
- 2) Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi atau praktek yang berlaku
- 3) Membuat perbandingan atau evaluasi
- 4) Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menentukan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Darmadi (2014:35) mengatakan agar penelitian dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan atau didapat oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Data primer

Yakni pengumpulan data yang dikumpulkan atau didapat oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data primer antara lain wawancara, observasi, diskusi terfokus.

2. Data sekunder

Yakni pengumpulan data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, jurnal, dan lain-lain.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan batuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar.

Menurut Bungin (2012:196) analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh penelitian melalui perangkat metodologi tertentu. Analisis data dimulai dengan mencari data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumentasi, gambar, dan sebagainya.

Data yang telah diolah kemudian di analisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberi gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

Menurut Miles dan Huberman dalam Emzir (2012:129) ada 3 (tiga) macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan “sebelum” data secara aktual dikumpulkan. Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa episode selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-tema, membuat pemisah-pemisah, menulis memo-memo). Dan reduksi data/pentransformasian proses terus-menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir lengkap.

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Seperti yang disebutkan Emzir dengan melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis

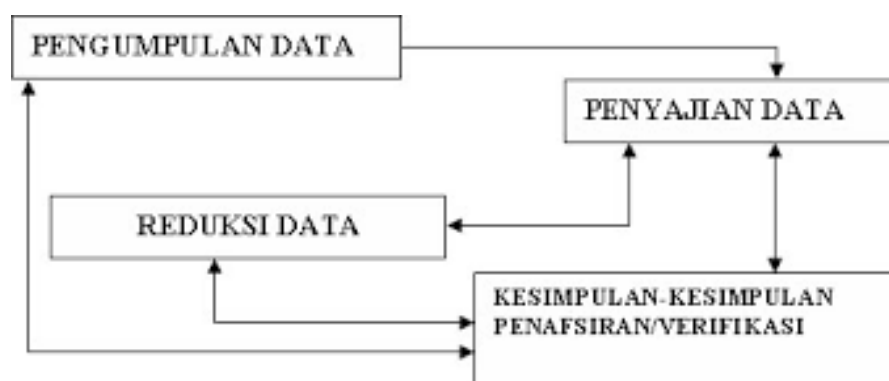
lanjutan atau tindakan yang didasarkan pada pemahaman tersebut. Pada umumnya teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti itu peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis.

3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.



Sumber : Emzir, metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data. 2012:129

D. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat, atau kriteria tertentu kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut:

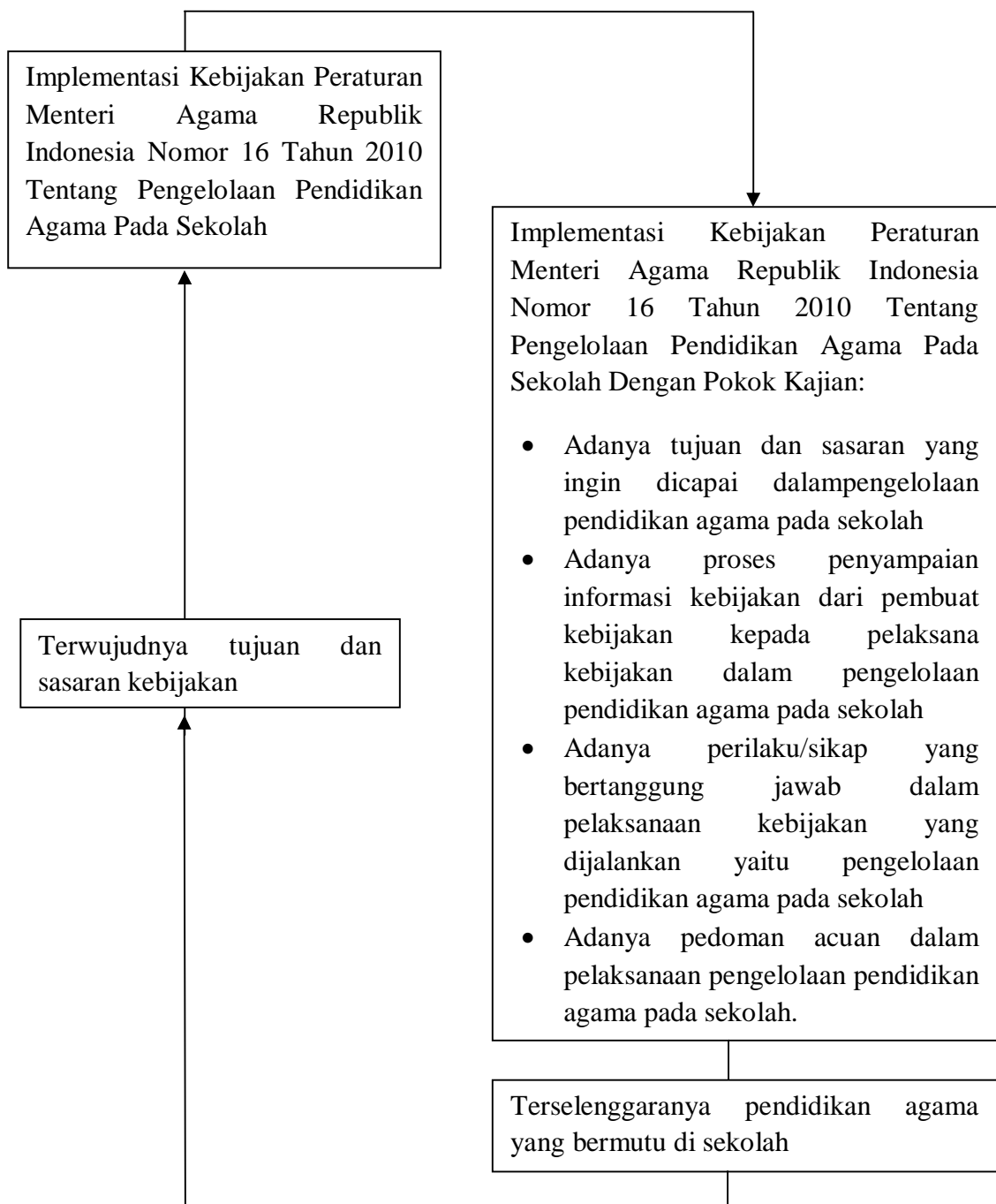
1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan pendidikan agama pada sekolah.
2. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam pengelolaan pendidikan agama pada sekolah.
3. Adanya perilaku/sikap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan yaitu pengelolaan pendidikan agama pada sekolah
4. Adanya pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan agama pada sekolah.

E. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP



F. Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak; kejadian, keadaan kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penulisan ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.
2. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri
3. Implementasi Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.
4. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses, perbuatan, dan cara mendidik

5. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

G. Narasumber

Adapun narasumber dari penelitian ini adalah 6 orang yang terdiri atas:

1. Kepala Sekolah SD Negeri 173198 Pansurnatolu

Nama : Sahat Simanjuntak

Umur : 56 tahun

Pendidikan : S1

2. Tata Usaha/ operator sekolah sekolah

Nama : Henri Gultom

Umur : 35 tahun

Pendidikan : S1

3. Guru SD Negeri 173198

Nama : Ipong Swardi Gultom

Umur : 48 tahun

Pendidikan : S1

4. Guru SD Negeri 173198

Nama : Lamria Gultom

Umur : 46 tahun

Pendidikan : S1

5. Orang tua siswa SD Negeri 173198 Pansurnatolu

Nama : Kardiman Nainggolan

Umur : 36 tahun

Pendidikan : SMA

6. Orang tua siswa SD Negeri 173198 Pansurnatolu

Nama : Wahirun Nainggolan

Umur : 43 Tahun

Pendidikan : SMA

H. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Sekolah Dasar Negeri 173198 Pansurnatolu, Tapanuli Utara yang berada di Desa Pansurnatolu, Dusun Huta Lama Kecamatan Pangaribuan. Dan waktu penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari hingga selesai.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1) Sejarah Singkat SD Negeri 173198 Pansurnatolu, Tapanuli Utara

Hampir sebagian besar orang tua berusaha mencari lembaga pendidikan yang kondusif terhadap anaknya terutama pendidikan dasar. Hal ini dilakukan karena pendidikan anak pada tingkat dasar menjadi bagian terpenting dalam proses perjalanan masa depan anak yang akan dijalani anak yang mampu menjawab segala tantangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan datang. Namun dalam pencarian lembaga pendidikan tersebut, orang tua diharapkan mempelajari dan melihat langsung keberadaan

sekolah tersebut. Baik dari segi sarana, fasilitas, tujuan, kurikulum, maupun tenaga pengajarnya.

Sekolah Dasar Negeri 173198 yang berada di Desa Pansurnatolu Dusun Huta Lama, Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara yang didirikan pada tahun 1910 dengan kondisi sekolah yang masih sangat memprihatikan. Bangunan sekolah yang masih terdiri dari 3 (tiga) kelas yaitu ruangan kelas I, ruangan kelas II, dan ruangan kelas III. Untuk kelas IV, kelas V, dan kelas VI siswa harus melanjutkan ke SD Negeri 173197 Rahutbosi Kecamatan Pangaribuan yang lumayan jauh dari dusun Huta Lama. Pada tanggal 16 Maret 1983 masyarakat Pansurnatolu melakukan musyawarah dan atas hasil dari musyawarah tersebut masyarakat sepakat menyerahkan tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter bujur sangkar) kepada pemerintah untuk pertapakan SD Negeri 173198 Pansurnatolu yang akan direnovasi dan di pindahkan dari tempat awal berdirinya sekolah tersebut. Dengan demikian dibangunlah SD Negeri 173198 Pansurnatolu dengan Tanggal SK pendirian 18 Mei 1954, dan SK akreditasi tanggal 12 November 2008, dengan nomor SK Akreditasi Dd.030804.

Pada awal tahun berdirinya SD Negeri 173198 Pansurnatolu ini dengan keadaan yang memprihatinkan sebab dulunya sekolah tersebut adalah bekas hutan sehingga saat dijadikan sekolah tersebut tidak sepenuhnya seperti sekolah biasa, lantai masih beralaskan tanah dan setiap kelas memiliki keadaan yang memprihatinkan. Ruangan kelas yang ber dinding kayu-kayu sehingga kelas yang lain dapat melihat karena hanya dibatasi oleh papan-papan kayu yang

disusun rapi. Dilihat dari luar SD Negeri 173198 Pansurnatolu hanyalah sekolah biasa seperti sekolah-sekolah lainnya, namun jika dilihat dari dalam sangat memprihatinkan. Terkadang setiap hujan turun ada beberapa kelas yang atapnya bocor sehingga keadaan belajar pun terganggu. Bangku dan meja yang setiap kelas sangatlah kurang sehingga murid-murid duduk dibangku panjang yang seharusnya berdua namun dengan keadaan yang kurang maka dibuat tiga atau sampai empat murid dalam satu bangku panjang. Dengan melihat keadaan yang sangat memprihatinkan maka bantuan dari pemerintah pun datang sehingga satu per satu kelas dan lingkungan sekolah diperbaiki, mulai dari lantainya, atap kelas yang bocor, dinding sekolah, bangku dan meja sekolah sampai papan tulis.

Tahun demi tahun sekolah tersebut terus memiliki perubahan sampai akhirnya sekolah tersebut dikenal banyak orang karena penghijauan, banyaknya pohon-pohon, bunga dan buah-buah yang ditanami disekitar lingkungan sekolah tersebut. Sekolah tersebut diperbaharui begitu pula kepala sekolahnya, setiap kepala sekolah memiliki visi dan misi untuk merubah sekolah tersebut menjadi lebih baik.

Dengan kurikulum yang baru dan kepala sekolah yang baru juga pihak sekolah membuat aktivitas yang bermanfaat yang nantinya akan menambah akhlak dan menambah wawasan siswa

Tabel 3.1**Jadwal kegiatan SD Negeri 173198 Pansurnatolu, Tapanuli Utara**

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
Upacara	Senam pagi	Senam pagi	Senam pagi	Senam pagi Jumat bersih	Kebaktian untuk (Kristen)

Sumber :SD Negeri 173198 Pansurnatolu 2017/2018

Sekolah Dasar Negeri 173198 Pansurnatolu di Dusun Huta Lama, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara memiliki izin Status Pemerintah Pusat, dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 10206368 dan mendapat Akreditasi B untuk Sekolah Dasar Negeri 173198 ini.

Adapun status Sekolah Dasar Negeri 173198 Pansurnatolu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2**Status Sekolah Dasar Negeri 173198 Pansurnatolu**

Status Kepemilikan	Pemerintah Pusat
Naungan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	10206368
Status	Negeri
Tanggal SK Pendirian Sekolah	18 Mei 1954
Tanggal SK Izin Operasional	01 Januari 1910
NO. SK Akreditasi	Dd. 030804

Sumber :SD Negeri 173198 Pansurnatolu 2017/2018

Tabel 3.3
Pihak Pengajar/ Ketenagaan Sekolah Menurut Golongan Di
SD Negeri 173198 Pansurnatolu

Tenaga Administrasi Non PNS	1
Guru PNS	4
Guru Non PNS	4
Kepala Sekolah	1

Sumber : Sekolah Dasar Negeri 173198 Pansurnatolu 2017/2018

2). Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah

a. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan tentang kemana instansi pemerintah harus diarahkan agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai atau identitas atau keberadaan organisasi dalam tugas pokok dan fungsi organisasi yang memandu setiap kegiatan organisasi secara berencana dan berkelanjutan.

Untuk menggambarkan yang ingin dicapai identitas atau keberadaan dalam rangka mengembangkan tugas pokok dan fungsi organisasi yang memandu setiap kegiatan organisasi secara berencana, berkelanjutan, dan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat. Maka dirumuskan visi SD Negeri 173198 Pansurnatolu yaitu: "Terwujudnya siswa/siswi SD Negeri 173198 Pansurnatolu yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur serta memiliki

kemampuan dasar : Membaca, Menulis, Berhitung untuk bekal melanjutkan sekolahnya ke sekolah yang lebih tinggi.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Proses perumusan misi organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan memberi peluang untuk perubahan yang sesuai dengan tuntutan lingkungan. Adapun Misi SD Negeri 173198 Pansurnatolu adalah sebagai berikut: “Menciptakan siswa/siswi SD Negeri 173198 Pansurnatolu menjadi manusia yang bermoral, berakhlak baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berlaku ditengah masyarakat sekitar, Bangsa dan Negara.”

- 1) Memberikan pengetahuan dasar calistung kepada siswa
- 2) Memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada siswa/siswi yang berguna bagi kehidupannya sehari-hari.
- 3) Membiasakan pelaksanaan disiplin.
- 4) Membiasakan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Simpatik)
- 5) Melaksanakan pembelajaran, menyenangkan, kreatif, dialogis, dan produktif
- 6) Menciptakan lingkungan sekolah yang indah, sejuk, nyaman dan memupuk rasa kekeluargaan.
- 7) Menumbuh kembangkan minat baca siswa sehingga berprestasi.

c. Tujuan Sekolah

1. Secara Umum

- a) Menciptakan siswa-siswi SD Negeri 173198 Pansurnatolu memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar calistreng dan berkomunikasi yang baik sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- b) Menciptakan siswa-siswi SD Negeri 173198 Pansurnatolu memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan norma dan budi pekerti luhur yang mencerminkan Nilai Agama Pancasila.
- c) Mempersiapkan siswa-siswi SD Negeri 173198 Pansurnatolu untuk mengikuti pendidikan ke sekolah lanjutan (SMP)

2. Tujuan Jangka Pendek (TP. 2017-2018)

- a) Terwujudnya kegiatan pembelajaran yang baik dan kreatif
- b) Nilai rata-rata sekolah per mata pelajaran 6,00
- c) KBM Efektif minimal 95%
- d) Target kurikulum minimal 95%
- e) Daya serap mencapai 90%
- f) Mengikuti lomba mata pelajaran, Lomba Cerdas Tangkas, digugus dan Kecamatan.
- g) Melaksanakan KKg sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

3. Tujuan Jangka Menengah

- a) Mencapai Prestasi Akademis minimal 6,50
- b) Memiliki pedoman perilaku warga sekolah yang berbudi pekerti luhur

- c) Menurunkan angka putus sekolah kurang dari 1%
- d) Memiliki lingkungan yang bersih

4. Tugas Pokok

- a) Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara efisien sesuai Kurikulum yang berlaku (KTSP)
- b) Membina Guru dalam pelaksanaan pembelajaran
- c) Membina kerjasama dengan orang tua, masyarakat dan instansi terkait.
- d) Melaksanakan bimbingan konseling bagi siswa
- e) Menata lingkungan dengan baik
- f) Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Rakyat.

5. Fungsi

- a) Menyusun perencanaan dan pengawasan terhadap program tugas-tugas pokok
- b) Melaksanakan dan mengembangkan konsep mutu pendidikan
- c) Merupakan Management Partisipasif.

6.Sasaran

- a) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah dengan baik
- b) Siswa memiliki disiplin yang tinggi
- c) Mencapai target sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
- d) Profesionalisme dan dedikasi tenaga kependidikan meningkat.

3. Struktur Organisasi SD Negeri 173198 Pansurnatolu

Setiap organisasi baik yang besar dan maupun kecil harus mempunyai stuktur organisasi yang baik dan disusun sesuai dengan keadaan yang berlaku di organisasi tersebut. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi individu-individu yang berada dalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas bersama-sama secara harmonis untuk mencapai organisasi yang lebih baik dan maju.

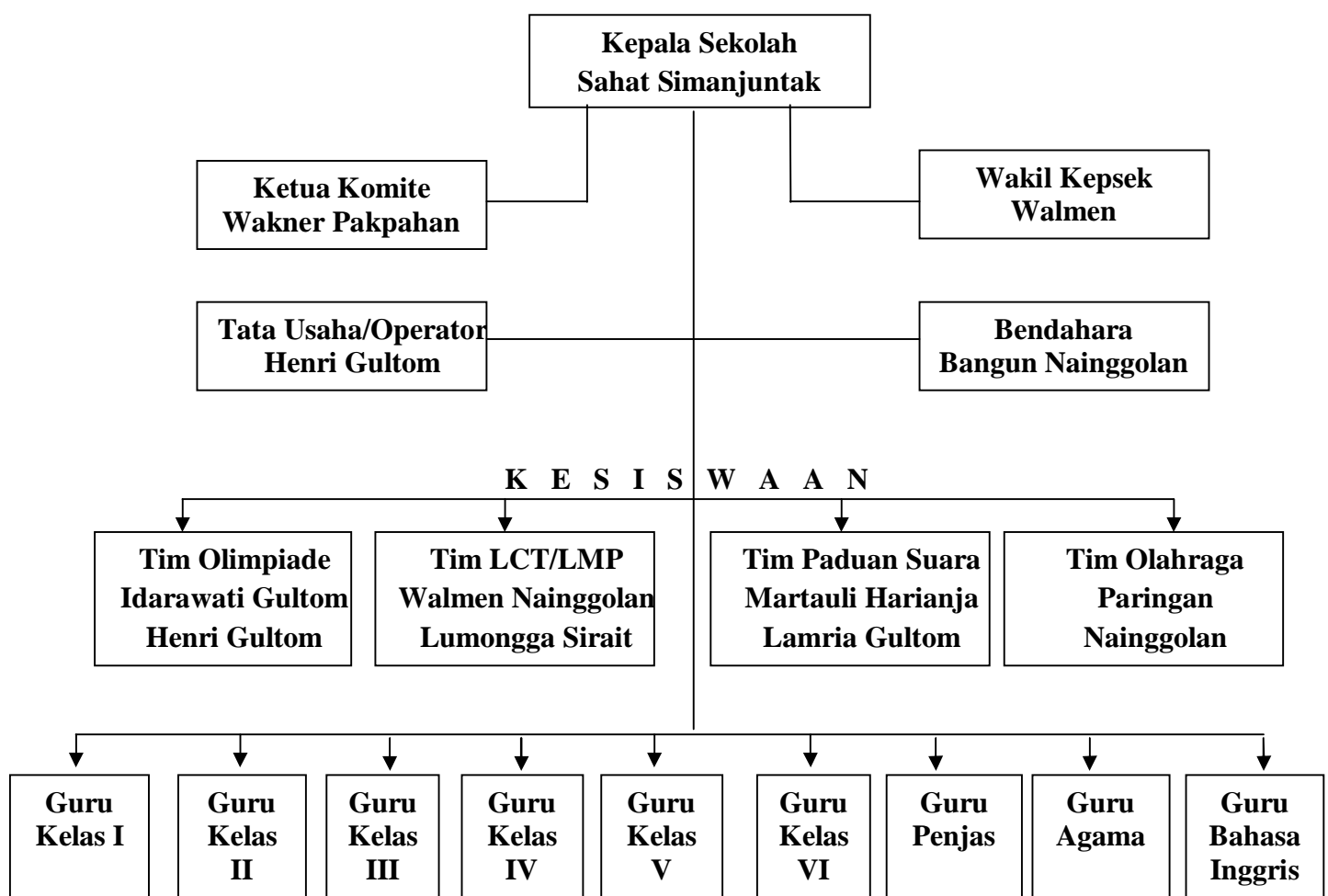
Begitu juga dengan SD Negeri 173198 Pansurnatolu memiliki stuktur organisasi. Pihak-pihak yang ada dalam SD Negeri 173198 Pansurnatolu diatur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi agar dapat meningkatkan efektifitas kerja. Dari stuktur organisasi ini akan jelas terlihat adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga terdapat koordinasi diantara tiap-tiap bagian tersebut. Jadi, dengan adanya stuktur organisasi yang baik dimungkinkan tiap-tiap orang bekerja dan efektif dan efesien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi.

Berdasarkan struktur organisasi, penulis melihat bahwa di SD Negeri 173198 Pansurnatolu ini menetapkan bentuk struktur organisasi garis/lini, yang menggambarkan hubungan antara bagian secara vertikal. Oleh karena itu para bawahan mengenal seorang atasan dan pertanggung jawaban diberikan sesuai dengan instruksi atasannya.

Berdasarkan dari ketentuan dan kesepakatan yang telah diputuskan maka terbentuklah bagan struktur organisasi SD Negeri 173198 Pansurnatolu secara hirarkis kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha/operator sekolah, komite sekolah, bendahara, dan kesiswaan (guru).

Adapun bagan stuktur/susun organisasi SD Negeri 173198 Pansurnatolu adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2
Bagan Stuktur Organisasi SD Negeri 173198 Pansurnatolu



Sumber : Sekolah Dasar Negeri 173198 Pansurnatolu 2017/2018

4. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

a. Kepala Sekolah

Kepala sekolah merupakan personil sekolah yang bertanggung jawab seluruh kegiatan-kegiatan sekolah. Ia mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan suatu kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya dengan dasar Pancasila. Tugas pokok dan fungsi Kepala Sekolah juga harus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Sekolah, meliputi:

- 1). Perencanaan Program
- 2). Pelaksanaan Rencana Kerja
- 3). Pengawasan dan Evaluasi
- 4). Kepemimpinan Sekolah
- 5). Sistem Informasi Sekolah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, pasal 12 ayat (4) menyatakan bahwa penilaian kinerja Kepala Sekolah, meliputi:

- a. Usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah;
- b. Peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
- c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah.

Berikut ini Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah:

a. Perencanaan Program, meliputi :

- 1) Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi sekolah
- 2) Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi sekolah
- 3) Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan sekolah
- 4) Membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
- 5) Membuat Perencanaan program induksi.

b. Pelaksanaan Rencana Kerja, meliputi:

- 1) Menyusun pedoman kerja
- 2) Menyusun struktur organisasi sekolah
- 3) Menyusun jadwal pelaksanaan kerja sekolah per semester dan tahunan
- 4) Menyusun pengelolaan kesiswaan yang meliputi: melaksanakan penerimaan didik baru, memberikan layanan konseling kepada peserta didik, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk para peserta didik, melakukan pelacakan kepada alumni.
- 5) Menyusun KTSP, kalender pendidikan dan kegiatan pembelajaran
- 6) Mengelola pendidik dan tenaga kependidikan
- 7) Mengelola sarana dan prasarana
- 8) Membimbing guru pemula
- 9) Mengelola keuangan dan pembiayaan
- 10) Mengelola budaya dan lingkungan sekolah
- 11) Memberdayakan peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah
- 12) Melaksanakan program induksi.

c. Supervise dan Evaluasi, meliputi :

- 1) Melaksanakan program supervisi
- 2) Melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
- 3) Melaksanakan Evaluasi dan pengembangan KTPS
- 4) Mengevaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
- 5) Menyiapkan kelengkapan akreditasi sekolah

d. Kepemimpinan Sekolah, meliputi:

- 1) Menjabarkan visi kedalam misi target mutu
- 2) Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai
- 3) Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah
- 4) Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu
- 5) Bertanggungjawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah
- 6) Melibatkan guru dan komite sekolah dalam pengambilan keputusan harus melibatkan penyelenggaraan sekolah
- 7) Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orangtua peserta didik dan masyarakat
- 8) Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan kode etik
- 9) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik.
- 10) Bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum

- 11) Melaksanakan dan merumuskan program supervise, serta memanfaatkan hasil supervise untuk meningkatkan kinerja sekolah
- 12) Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan melaksanakan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah
- 13) Membantu, membina dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar pendidikan dan pertumbuhan profesional para guru dan tanggal kependidikan
- 14) Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien dan efektif
- 15) Menjalin kerjasama dengan orangtua peserta didik, masyarakat serta komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat.
- 16) Memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggungjawab
- 17) Mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepala sekolah sesuai dengan bidangnya
- 18) Merencanakan melaksanakan program induksi guru pemula disekolah, dst.

e. Sistem Informasi Sekolah

- 1) Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif dengan membangun budaya sekolah untuk menciptakan suasana yang kompetitif bagi siswa, rasa tanggung jawab bagi guru dan karyawan, menimbulkan rasa nyaman dalam

bekerja dan belajar, menumbuhkan kesadaran tentang arti penting kemajuan, dan menumbuhkan kedisiplinan tinggi

- 2) Melakukan penataan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi warga sekolah berbasis kinerja
- 3) Menjalani kerjasama dengan pihak lain
- 4) Didukung oleh penerapan TIK dalam manajemen sekolah
- 5) Didukung oleh kepemimpinan/manajerial yang kuat, dan memiliki tingkat sustainsibilitas tinggi
- 6) Penguat eksistensi lembaga dengan melakukan sosialisasi kepada semua pihak untuk memberikan informasi dan pemahaman yang sama sehingga sekolah memperoleh dukungan secara maksimal
- 7) Meminimalkan masalah yang timbul disekolah melalui penguatan rasa kekeluargaan dan kebersamaan untuk memajukan sekolah
- 8) Menguatkan input sekolah dengan melengkapi berbagai fasilitas (perangkat keras dan lunak) manajemen sekolah agar implementasi sistem informasi manajemen berbasis TIK lebih efektif

b. Tugas Pokok dan Fungsi Komite Sekolah

a. Tujuan Dasar Pembentukan Komite Sekolah

Menjadi penghubung antara pihak sekolah dan orangtua siswa, tentang seluruh permasalahan dan informasi yang berkaitan dengan sekolah.

- b. Fungsi Utama Komite Sekolah
 - a. Pengawasan terhadap jalannya kegiatan sekolah baik secara administrasi maupun keuangan
 - b. Penghubung yang baik antara pihak sekolah dan pihak orang tua siswa
 - c. Pendukung setiap kegiatan sekolah yang membutuhkan baik secara moril maupun material.
 - c. Komite sekolah secara organisasi adalah:
 - a. Dibentuk di satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan
 - b. Dapat berbeda strukturnya dengan yang lain namun ada acuan yang diharapkan sama, yaitu tentang peran dan fungsi
 - d. Maksud pembentukan komite sekolah, adalah :
 - a. Agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan
 - b. Komite sekolah yang dibentuk dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografi, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat sesuai merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif.
 - e. Komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada:
 - a. Pengguna (client)
 - b. Berbagi kewenangan (power sharing and advocacy model)
 - c. Kemitraaan (partnership model)
 - d. Difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan

- f. Tujuan Pembentukan Komite Sekolah
 - a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan
 - b. Meningkatkan tanggung-jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
 - c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan
- g. Peran Komite Sekolah
 - a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan
 - b. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
 - c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan
 - d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.
- h. Fungsi Komite Sekolah
 - a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu

- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
- e. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Tata Usaha/Operator Sekolah

Berdasarkan PERMENDIKNAS No 24 tahun 2008, urusan tata usaha sekolah adalah bagian dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan sistem administrasi dan informasi pendidikan di sekolah. Fungsi dan tugas pokok bagian tata usaha sudah diatur sebagai berikut :

1. Perencanaan administrasi program dan anggaran.
2. Koordinator administrasi ketatausahaan

3. Pengelola administrasi program
4. Penyusun laporan program dan anggaran
5. Pembina staff

Sesuai dengan pengertian yang sudah dibahas diatas, pada tata usaha sekolahpun untuk urusan administrasi biasanya diberikan kepada salah satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab di bidang administrasi. Tugas tata usaha sebagai tenaga administrasi sekolah antara lain melaksanakan:

- a. Administrasi kepegawaian
 - 1) Melaksanakan prosedur dan mekanisme kepegawaian
 - 2) Merencanakan kebutuhan pegawai
 - 3) Menilai dan membina staff
- b. Administrasi keuangan

Melaksanakan administrasi keuangan sekolah meliputi keuangan rutin / dana komite sekolah/bantuan. Biasanya tugas ini dilakukan atau dirangkap oleh Kepala Tata Usaha

- c. Administrasi sarana dan prasarana
 - 1) Menyusun daftar kebutuhan sarana dan prasarana
 - 2) Mencatat dan menginventarisir sarana sekolah
 - 3) Menyimpan dokumen kepemilikan
 - 4) Membuat daftar inventaris ruang, dll
- d. Administrasi Humas
 - 1) Membantu kegiatan komite sekolah

- 2) Menjalin kerjasama dengan pemerintah dan lembaga masyarakat sebagai Stakeholders
 - 3) Mencatat dan mendokumentasikan proses kegiatan kehumasan
 - 4) Mempromosikan sekolah dan mengkoordinasikan penelusuran tamatan
- e. Administrasi persuratan dan kearsipan
- 1) Mengelola surat masuk dan surat keluar
 - 2) Menggandakan surat
 - 3) Mengelola buku ekspedisi persuratan
 - 4) Memelihara dan menata kearsipan dokumen
- f. Administrasi kesiswaan
- 1) Membuat daftar nomor induk siswa
 - 2) Menyusun daftar kegiatan siswa
 - 3) Membuat usulan peserta ujian
 - 4) Menginventarisir daftar lulusan
 - 5) Menyimpan daftar nilai (Leger)
 - 6) Menginventarisir pendaftaran siswa baru
- g. Administrasi layanan khusus

Melaksanakan fungsi koordinator layanan khusus seperti penjaga sekolah, tukang kebun dan lain - lainnya.

h. Teknologi informasi dan komunikasi

Koordinator layanan data dan informasi seperti mengakses data, mendokumentasikan administrasi, dan menginformasikan serta mempromosikan.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Guru

Guru adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa dan negara. Guru harus bertanggung jawab atas segala sikap dan tingkah laku, dan perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik. Berkaitan dengan pendidikan di lembaga sekolah, ada 6 tugas pokok guru dalam pendidikan, antara lain :

a. Guru Sebagai Pendidik

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggungjawab, wibawa, mandiri dan disiplin.

b. Guru Sebagai Pengajar

Guru sebagai pengajar, harus terus mengikuti perkembangan teknologi, sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-hal yang up-to-date dan tidak ketinggalan jaman. Untuk itu guru harus senantiasa mengembangkan profesinya secara profesional

c. Guru Sebagai Pembimbing

Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang bertanggung jawab. Sebagai pembimbing semua kegiatan yang dilakukan oleh guru harus berdasarkan kerjasama yang baik antara guru dengan peserta didik.

d. Guru Sebagai Pengarah

Guru adalah seorang pengarah bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Sebagai pengarah guru harus mampu mengarahkan peserta didik dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan dan menemukan jati dirinya.

e. Guru Sebagai Pelatih

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Adapun tupoksi guru dalam hal melatih siswa, antara lain:

- 1) Membuat program pengajaran (silabus, rpp, prota, promes)
- 2) Menganalisa materi pelajaran
- 3) Membuat lembar kerja siswa (LKS)
- 4) Membuat program kerja harian/jurnal belajar
- 5) Melaksanakan kegiatan pembelajaran
- 6) Melaksanakan kegiatan penilaian baik itu ulangan harian, tengah semester atau akhir semester.
- 7) Melaksanakan analisis ulangan, program remedial, pengayaan
- 8) Mengisi daftar nilai siswa, mengisi rapor
- 9) Melaksanakan bimbingan kelas/konseling
- 10) Melaksanakan kegiatan bimbingan guru/tutor sebaya apabila telah mengikuti pelatihan

- 11) Membuat alat bantu mengajar/alat peraga
- 12) Mengikuti perkembangan dan permasalahan kurikulum
- 13) Melaksanakan fungsi tertentu di sekolah (pks, wali kelas, dll)
- 14) Membuat catatan tentang kemajuan peserta didik
- 15) Meneliti daftar hadir siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung
- 16) Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya
- 17) Menumbuhkembangkan sikap menghargai seni
- 18) Mengikuti kurikulum
- 19) Mengadakan penelitian tindakan kelas
- 20) Mengumpulkan angka kredit dan menghitungnya untuk kenaikan pangkat.

f. Guru Sebagai Penilai

Penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik.

e. Defenisi Siswa/ Peserta Didik

Dunia pendidikan adalah sebuah sistem yang kompleks dan memiliki banyak unsur yang harus ada didalamnya. Salah satu unsur yang paling penting adalah siswa/peserta didik. Siswa atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar, dalam proses belajar- mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Siswa akan

menjadi faktor penentu, sehingga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian siswa berarti orang, anak yang sedang berguru (belajar, bersekolah). Sedangkan menurut pasal 1 ayat (4) UU RI No. 20 tahun 2013. Mengenai sistem pendidikan nasional, dimana siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri mereka melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasiswa adalah anak yang bersekolah untuk mengembangkan diri mereka.

Secara terminologi peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun fikiran. Berkaitan dengan pendidikan di lembaga sekolah, ada 5 unsur pokok tugas seorang siswa di sekolah, antara lain:

a. Belajar

Belajar merupakan tugas pokok seorang siswa, karena melalui belajar dapat menciptakan generasi muda yang cerdas. Tugas siswa di sekolah dibagi menjadi 2 diantaranya adalah:

- 1) Memahami dan mempelajari materi yang diajarkan
- 2) Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru.

b. Mempelajari kembali materi yang telah diajarkan dan mengerjakan PR jika Ada PR.

c. Taat pada peraturan sekolah

Setiap sekolah memiliki tata-tertib yang harus ditaati oleh para siswa, demi terciptanya kondisi sekolah yang kondusif, aman, nyaman untuk siswa dalam belajar dan menjalani aktivitas selama di sekolah. Selain itu tata-tertib sekolah juga sebagai patokan dan kontrol perilaku siswa di sekolah.

d. Patuh dan hormat pada guru

Tugas seorang siswa di sekolah selanjutnya adalah patuh dan hormat kepada guru. Rahmat, barokah dan manfaat dari sebuah ilmu itu tergantung dari ridhonya guru.

e. Disiplin

Ada sebuah istilah “ kunci meraih sukses adalah disiplin” istilah ini memiliki makna yang kuat jika seseorang memiliki disiplin yang tinggi maka dia akan sukses. Begitu juga dengan siswa jika seorang siswa memiliki disiplin yang tinggi maka dia akan dapat meraih cita-cita yang diinginkan.

f. Menjaga nama baik sekolah

Menjaga nama baik sekolah adalah kewajiban setiap siswa, dengan menjaga nama baik sekolah maka siswa dan sekolah akan mendapatkan nilai positif dari masyarakat. Dan jika siswa dapat memberikan prestasi bagi sekolah akan menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Narasumber

Setelah dilakukan penelitian di lapangan, maka diperoleh berbagai data mengenai pendapat responden. Dalam bab ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di SD Negeri 173198 Pansurnatolu. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu: Kepala Sekolah SD Negeri 173198 Pansurnatolu, Tata Usaha/Operator SD Negeri 173198 Pansurnatolu, Guru SD Negeri 173198 Pansurnatolu, Orang tua siswa SD Negeri 173198 Pansurnatolu. Adapun kondisi narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.1

Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	5	83%
2	Perempuan	1	16,6%
Jumlah		6	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang atau 83% sedangkan sisanya berasal dari responden perempuan sebanyak 1 orang dengan persentase 16,6%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan tingkat sarjana dan narasumber dengan tingkat pendidikan SMA. Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.2

Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	S1	4	66,4 %
2	SMA	2	33,2 %
Jumlah		6	100 %

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari tingkat pendidikan sarjana dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 66,4% sedangkan sisanya berasal dari responden SMA sebanyak 2 orang dengan persentase 33,2%

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Berdasarkan umur, narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan umur 35-45 tahun, narasumber dengan umur 46-55

tahun dan narasumber dengan tingkat umur 56 tahun ke atas. Pada tabel 4.3 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.3

Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	35-45 Tahun	3	49,8%
2	46-55 Tahun	2	33,2%
3	56 Tahun ke atas	1	16,6%
Jumlah		6	100 %

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berumur 35-45 tahun dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 49,8%, selanjutnya narasumber yang berumur 46-55 tahun dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 33,2% dan sisanya berasal dari responden berumur 56 tahun keatas dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 16,6%

d. Distribusi Narasumber Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan golongan III/c, golongan III/d, dan narasumber dengan golongan IV/a. Pada tabel 4.4 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.4
Kondisi Narasumber Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Frekuensi	Persentase (%)
1	III/c	1	16,6%
2	III/d	2	33,2%
3	IV/a	1	16,6%
4	Orang Tua Siswa	2	33,2%
Jumlah		6	100 %

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber golongan III/d dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 33,2%, sedangkan narasumber golongan III/c dan IV/a dengan frekuensi sebanyak masing-masing 1 orang atau 16,6%.

2. Deskripsi Sekolah Dasar Negeri 173198 Pansurnatolu

Data tentang keadaan fisik/gambaran di SD Negeri 173198 Pansurnatolu dikelompokkan dalam fasilitas sekolah, sarana sekolah, dan data siswa SD Negeri 173198 Pansurnatolu. Adapun keadaan fisik/gambaran di SD 173198 Pansurnatolu terkait dengan fasilitas sekolah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Fasilitas Sekolah yang ada di SD 173198 Pansurnatolu

Fasilitas Sekolah	Jumlah
Ruang Kelas Belajar	6
Kantor Kepala Sekolah	1
Ruang Tata Usaha/operator	1
Ruang Guru	1

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Tabel 4.6

Sarana Sekolah di SD 173198 Pansurnatolu

Sarana Sekolah	Jumlah
Komputer Kantor	1
Laptop/Notebook	2

Sumber :Data Wawancara Tahun 2018

Tabel 4.7

Data Siswa SD Negeri 173198 Pansurnatolu Berdasarkan Agama

Kelas	Kristen		Islam	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
I	17	13	-	-
II	18	12	-	1
III	20	11	-	1
IV	17	13	-	1
V	19	11	-	1
VI	13	16	2	1
Jumlah	104	76	2	5

Sumber :Data Wawancara Tahun 2018

3. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di SD Negeri 173198 Pansurnatolu, maka dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban responden sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

a. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan pendidikan agama pada sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 09:00 WIB dengan Bapak Sahat Simanjuntak (56 tahun) selaku Kepala Sekolah SD Negeri 173198 Pansurnatolu beliau mengatakan “Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kebijakantentang pengelolaan pendidikan agama Islam pada sekolah belum tercapai. Proses pengelolaan pendidikan agama Islam di sekolah ini tidak ada, disebabkan guru agama Islam yang tidak tersedia. Adapun yang sudah dilakukan dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan agama Islam dengan cara pembinaan budi pekerti, bekerjasama dengan orangtua, bekerjasama dengan tokoh agama Islam serta kendala/hambatan yang dihadapi adalah tidak tersedianya guru agama Islam disekolah ini. Solusinya agar guru agama Islam ditempatkan disekolah agar tujuan dan sasaran pengelolaan pendidikan agama khususnya agama Islam dapat tercapai.

Menurut Bapak Henri Gultom (36 tahun) selaku Tata Usaha/Operator Sekolah yang diwawancarai pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 09:30 WIB dengan beliau mengatakan “Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan pendidikan agama Islam pada sekolah belum tercapai. Proses pengelolaan pendidikan agama Islam di sekolah ini beberapa tahun terakhir tidak ada, karena guru agama Islam yang tidak tersedia. Adapun yang sudah dilakukan pihak sekolah dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan agama Islam dengan cara pembinaan budi pekerti, bekerjasama

dengan orangtua, bekerjasama dengan masyarakat sekitar desa Pansurnatolu serta kendala/hambatan yang dihadapi adalah tidak tersedianya guru agama Islam disekolah ini. Solusinya agar guru agama Islam ditempatkan disekolah ini seperti dahulu, dan tidak meminta untuk dipindahkan ke sekolah lain disebabkan lingkungan yang mayoritas non muslim.

Sementara itu Bapak Ipong Swardi Gultom (48 tahun) selaku guru kelas yang diwawancarai pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 10:00 WIB beliau mengatakan “Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan pendidikan agama Islam pada sekolah belum tercapai. Proses pengelolaan pendidikan agama Islam di sekolah ini belum ada, karena tidak adanya guru agama Islam. Adapun yang sudah dilakukan dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan agama Islam dengan cara pembinaan budi pekerti, bekerjasama dengan orangtua, bekerjasama dengan tokoh agama Islam serta kendala/hambatan yang dihadapi adalah tidak tersedianya guru agama Islam disekolah ini sehingga sulit dalam mencapai tujuankebijakan pengelolaan pendidikan agama tersebut. Solusinya agar guru agama Islam ditempatkan disekolah inidan siswa yang beragama Islam dapat belajar pendidikan agama seperti mata pelajaran yang lain.

Menurut Ibu Lamria Gultom (46 tahun) selaku guru kelas dan guru pendidikan agama Kristen yang diwawancarai pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 11:00 WIB beliau mengatakan “Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan pendidikan agama Islam pada sekolah ini belum tercapai. Proses pengelolaan pendidikan agama Islam di

sekolah ini belum ada, hal ini disebabkan karena tidak adanya guru agama Islam disekolah ini. Adapun yang sudah dilakukan dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan agama Islam dengan cara pembinaan budi pekerti kepada siswa, bekerjasama dengan orangtua siswa, bekerjasama dengan tokoh agama Islam serta kendala/hambatan yang dihadapi adalah tidak tersedianya guru agama Islam, adapun dahulu guru agama Islam ditempatkan di sekolah ini beberapa tahun kemudian langsung mengurus surat pindah hal ini dipicu oleh lingkungan masyarakat yang lebih mayoritas beragama Kristen.

Dari wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 15:00 WIB dengan Bapak Kardiman Nainggolan (36 tahun) selaku orang tua siswa beliau mengatakan “Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kebijakantentang pengelolaan pendidikan agama Islam pada sekolah ini belum tercapai. Proses pengelolaan pendidikan agama Islam di sekolah ini sampai sekarang tidak ada hal ini terbukti dari tidak adanya guru agama Islam dan proses belajar agama Islam disekolah tersebut. Adapun yang sudah dilakukan dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan agama Islam dengan cara pembinaan budi pekerti kepada siswa, bekerjasama dengan orang tua, bekerjasama dengan masyarakat yang beragama Islam serta kendala/hambatan yang dihadapi adalah tidak tersedianya guru agama Islam, mungkin dikarenakan sedikitnya jumlah siswa beragama Islam disekolah ini.

Sementara itu Bapak Wahirun Nainggolan (45 tahun) selaku orang tua siswa yang diwawancarai pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 15:30 WIB beliau mengatakan “Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan

tentang pengelolaan pendidikan agama Islam pada sekolah ini belum tercapai. Proses pengelolaan pendidikan agama Islam di sekolah ini sampai sekarang tidak ada hal ini terbukti dari tidak adanya guru agama Islam dan proses belajar agama Islam disekolah tersebut. Adapun yang sudah dilakukan dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan agama Islam dengan belajar budi pekerti disekolah, bekerjasama dengan orang tua siswa, bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kendala/hambatan yang dihadapi adalah tidak tersedianya guru agama Islam, hal ini terjadi dikarenakan sedikitnya jumlah siswa beragama Islam disekolah ini.

Dengan demikian dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu di sekolah belum tercapai sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan tidak tersedianya tenaga pendidik/guru agama Islam (sumber daya manusia) di sekolah tersebut. Adapun yang sudah dilakukan pihak sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam yaitu dengan pembinaan budi pekerti kepada siswa, kerjasama dengan pihak orangtua siswa, dan masyarakat yang berada di desa Pansurnatolu. Cara mengatasi kendala yang ada SD Negeri 173198 Pansurnatolu yaitu dengan menempatkan tenaga pendidik/guru agama Islam di sekolah tersebut.

b. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam pengelolaan pendidikan agama pada sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 09:00 WIB dengan Bapak Sahat Simanjuntak (56 tahun) selaku Kepala Sekolah SD Negeri 173198 Pansurnatolu beliau mengatakan “dinas pendidikan belum ada mensosialisasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama kepada pihak sekolah sampai sekarang. Karena peraturan menteri agama tersebut belum disosialisasikan maka tidak ada cara pihak sekolah dalam menyampaikan dengan pihak-pihak terkait. Adapun kendala dalam mensosialisasikan peraturan tentang pengelolaan pendidikan tersebut adalah karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan ke sekolah-sekolah, cara mengatasinya dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan mengenai pengelolaan pendidikan agama khususnya di desa-desa yang mayoritas agama tertentu.

Menurut Bapak Henri Gultom (36 tahun) selaku Tata Usaha/Operator Sekolah SD Negeri 173198 Pansurnatolu yang diwawancarai pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 09:30 WIB beliau mengatakan “dinas pendidikan belum ada mensosialisasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama kepada pihak sekolah sampai sekarang. Karena peraturan menteri agama tersebut belum disosialisasikan maka pihak sekolah sampai sekarang belum ada melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak

terkait. Adapun kendala dalam mensosialisasikan peraturan tentang pengelolaan pendidikan tersebut adalah karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan ke sekolah-sekolah, cara mengatasinya dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan mengenai pengelolaan pendidikan agama dan harapannya sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 10:00 WIB dengan Bapak Ipong Swardi Gultom (48 tahun) selaku guru kelas SD Negeri 173198 Pansurnatolu beliau mengatakan “dinas pendidikan belum ada mensosialisasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama kepada pihak sekolah. Karena peraturan menteri agama tersebut belum disosialisasikan maka pihak sekolah sampai sekarang belum ada melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Adapun kendala dalam mensosialisasikan peraturan tentang pengelolaan pendidikan tersebut adalah karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan ke sekolah-sekolah, cara mengatasinya dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan mengenai peraturan menteri agama tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah.

Sementara itu Ibu Lamria Gultom (46 tahun) selaku guru kelas dan guru pendidikan agama Kristen yang diwawancarai pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 11:00 WIB dengan beliau mengatakan “dinas pendidikan belum ada mensosialisasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama kepada pihak sekolah. Karena

peraturan menteri agama tersebut belum disosialisasikan maka pihak sekolah sampai sekarang belum ada melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Adapun kendala dalam mensosialisasikan peraturan tentang pengelolaan pendidikan tersebut adalah karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan ke sekolah tersebut, cara mengatasinya dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan sehingga sekolah dapat menjalankan peraturan demi tercapainya tujuan dan sasaran tentang pengelolaan pendidikan agama Islam khususnya pada sekolah.

Hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 15:00 WIB dengan Bapak Kardiman Nainggolan (36 tahun) selaku orang tua siswa beliau mengatakan “dinas pendidikan belum ada mensosialisasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama kepada pihak sekolah. Karena peraturan menteri agama tersebut belum disosialisasikan maka pihak sekolah sampai sekarang belum ada melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Adapun kendala dalam mensosialisasikan peraturan tentang pengelolaan pendidikan tersebut adalah karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan ke sekolah tersebut, cara mengatasinya dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan ke sekolah sehingga pihak-pihak terkait dapat menjalankan peraturan tersebut.

Sementara itu Bapak Wahirun Nainggolan (45 tahun) selaku orang tua siswa yang diwawancarai pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 15:30 WIB beliau mengatakan “dinas pendidikan belum ada mensosialisasikan

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama kepada pihak sekolah. Karena peraturan menteri agama tersebut belum disosialisasikan maka pihak sekolah sampai sekarang belum ada melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Adapun kendala dalam mensosialisasikan peraturan tentang pengelolaan pendidikan tersebut adalah karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan ke sekolah tersebut, cara mengatasinya dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan ke sekolah.

Dengan demikian dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian informasi kebijakan (komunikasi) dari dinas pendidikan kepada pihak sekolah belum tercapai. Hal ini terlihat dari tidak adanya komunikasi yang dilakukan dinas pendidikan kepada pihak SD Negeri 173198 Pansurnatolu seperti sosialisasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Adapun cara mengatasinya dengan adanya sosialisasi terlebih dahulu dari dinas pendidikan kepada pihak sekolah sehingga pihak sekolah dapat mensosialisasikan kembali kebijakan tersebut kepada pihak-pihak terkait.

c. Adanya perilaku/sikap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan yaitu pengelolaan pendidikan agama pada sekolah.

Menurut Bapak Sahat Simanjuntak (56 tahun) selaku Kepala Sekolah SD Negeri 173198 Pansurnatolu yang diwawancarai pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 09:00 WIB beliau mengatakan “usaha sekolah dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan agama Islam dengan melakukan

pembinaan budi pekerti, kerjasama dengan orangtua siswa dan jika ujian maka soal ujian agama Islam didapatkan dari sekolah lain. Adapun cara mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam di SD Negeri 173198 Pansurnatolu dengan berusaha agar siswa yang beragama Islam tetap dapat belajar dan melakukan ujian tertulis disaat ujian berlangsung. Tidak ada sanksi yang diberikan kepada sekolah yang tidak menyelenggarakan pendidikan agama, karena hal tersebut bukan disengaja oleh pihak sekolah melainkan minimnya minat tenaga pendidik agama Islam untuk mengajar di sekolah ini.

Dari wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 09:30 WIB dengan Bapak Henri Gultom (36 tahun) selaku Tata Usaha/Operator Sekolah SD Negeri 173198 Pansurnatolu beliau mengatakan“usaha sekolah dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan agama Islam dengan melakukan pembinaan budi pekerti, kerjasama dengan orangtua siswa dan jika ujian maka soal dan jawaban ujian agama Islam didapatkan dari sekolah lain serta guru kelas akan memeriksa jawaban siswa. Adapun cara mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam di SD Negeri 173198 Pansurnatolu dengan berusaha agar siswa yang beragama Islam tetap dapat belajar dan melakukan ujian tertulis disaat ujian berlangsung. Tidak ada sanksi yang diberikan kepada sekolah yang tidak menyelenggarakan pendidikan agama sampai sekarang.

Hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 10:00 WIB dengan Bapak Ipong Swardi Gultom (48 tahun) selaku guru kelas SD Negeri 173198 Pansurnatolu beliau mengatakan “usaha sekolah

dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan agama Islam dengan melakukan pembinaan budi pekerti, kerjasama dengan orangtua siswa dan jika ujian maka soal dan jawaban ujian agama Islam didapatkan dari sekolah lain serta guru kelas akan memeriksa jawaban siswa. Adapun cara mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam di SD Negeri 173198 Pansurnatolu dengan berusaha agar siswa yang beragama Islam tetap dapat belajar agama dengan melakukan pembinaan budi pekerti dan melakukan ujian tertulis disaat ujian berlangsung. Tidak ada sanksi yang diberikan kepada sekolah yang tidak menyelenggarakan pendidikan agama Islam tidak ada, karena guru agama Islam yang tidak ditempatkan di sekolah tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 11:00 WIB dengan Ibu Lamria Gultom (46 tahun) selaku guru kelas dan guru pendidikan agama Kristen beliau mengatakan “usaha sekolah dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan agama Islam dengan melakukan pembinaan budi pekerti, kerjasama dengan orangtua siswa dan jika ujian maka soal dan jawaban ujian agama Islam didapatkan dari sekolah lain serta guru kelas akan memeriksa jawaban siswa. Adapun cara mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam di SD Negeri 173198 Pansurnatolu dengan berusaha agar siswa yang beragama Islam tetap dapat belajar agama dengan melakukan pembinaan budi pekerti dan melakukan ujian tertulis disaat ujian berlangsung. Sanksi yang diberikan kepada sekolah yang tidak menyelenggarakan pendidikan agama Islam tidak ada, karena sekolah

sudah berusaha agar siswa mendapatkan pendidikan agama walaupun tidak dalam bentuk tatap muka dikelas.

Sementara itu Bapak Kardiman Nainggolan (36 tahun) selaku orang tua siswa yang diwawancarai pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 15:00 WIB dengan Bapak Kardiman Nainggolan (36 tahun) selaku orang tua siswa beliau mengatakan “usaha sekolah dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan agama Islam dengan melakukan pembinaan budi pekerti, kerjasama dengan orangtua siswa dan jika ujian maka soal dan jawaban ujian agama Islam didapatkan dari sekolah lain serta guru kelas akan memeriksa dan memasukkan nilai ujian tersebut ke rapor. Adapun cara mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam di SD Negeri 173198 Pansurnatolu dengan berusaha agar siswa yang beragama Islam tetap dapat belajar agama dengan melakukan pembinaan budi pekerti dan melakukan ujian tertulis disaat ujian berlangsung. Tidak ada sanksi yang diberikan kepada sekolah yang tidak menyelenggarakan pendidikan agama Islam padahal pendidikan agama itu sangat penting.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 15:30 WIB dengan Bapak Wahirun Nainggolan (45 tahun) selaku orang tua siswa beliau mengatakan “usaha sekolah dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan agama Islam dengan melakukan pembinaan budi pekerti, bekerjasama dengan orangtua siswa dan jika ujian maka soal dan jawaban ujian agama Islam didapatkan dari sekolah lain serta guru kelas akan memeriksa dan memasukkan nilai ujian tersebut ke rapor. Adapun cara

mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam di SD Negeri 173198 Pansurnatolu dengan berusaha agar siswa yang beragama Islam tetap dapat belajar agama dengan melakukan pembinaan budi pekerti dan melakukan ujian tertulis disaat ujian berlangsung. Tidak ada sanksi yang diberikan kepada sekolah yang tidak menyelenggarakan pendidikan agama Islam.

Dengan demikian dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa adanya sikap yang bertanggung jawab pihak sekolah terhadap pelaksanaan kebijakan peraturan menteri agama nomor 16 tahun 2010 walaupun sepenuhnya belum sesuai dengan yang diamanatkan dalam kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan karena beberapa kendala diantaranya kurangnya kuantitas tenaga pendidik agama Islam, kurangnya sarana dan prasarana dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan agama. Adapun usaha sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam dengan melakukan pembinaan budi pekerti, kerjasama dengan orangtua siswa dan jika ujian maka soal didapatkan dari sekolah lain serta guru kelas akan memeriksa jawaban siswa.

d. Adanya pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan agama pada sekolah.

Dari wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 09:00 WIB dengan Bapak Sahat Simanjuntak (56 tahun) selaku Kepala Sekolah SD Negeri 173198 Pansurnatolu beliau mengatakan “Dalam penyelenggaraan pendidikan agama sekolah ini menggunakan pedoman yang diberikan oleh menteri agama. Adapun cara pelaksanaan pedoman pengelolaan

pendidikan agama di sekolah ini sudah dijalankan semaksimal mungkin tetapi dalam hal penyelenggaraan pendidikan agama Islam memang belum dijalankan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri agama nomor 16 tahun 2010. Tidak ada pedoman lain yang digunakan dalam penyelenggaraan pengelolaan pendidikan agama disekolah ini. Dalam pelaksanaan pedoman pengelolaan pendidikan agama terdapat hambatan/kelemahan yaitu tidak adanya sosialisasi dari dinas pendidikan dan tidak adanya guru agama Islam di sekolah tersebut, adapun saran beliau agar pedoman dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan haruslah disosialisasikan terlebih dahulu.”

Menurut Bapak Henri Gultom (36 tahun) selaku Tata Usaha/Operator Sekolah SD Negeri 173198 Pansurnatolu yang diwawancarai pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 09:30 WIB beliau mengatakan“Dalam penyelenggaraan pendidikan agama sekolah ini menggunakan pedoman yang diberikan oleh menteri agama. Adapun cara pelaksanaan pedoman pengelolaan pendidikan agama di sekolah ini sudah dijalankan semaksimal mungkin tetapi dalam hal penyelenggaraan pendidikan agama Islam memang belum dijalankan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri agama nomor 16 tahun 2010. Tidak ada pedoman lain yang digunakan dalam penyelenggaraan pengelolaan pendidikan agama disekolah ini. Dalam pelaksanaan pedoman pengelolaan pendidikan agama terdapat hambatan/kelemahan yaitu tidak adanya sosialisasi dari dinas pendidikan dan tidak adanya guru agama Islam disekolah

tersebut, adapun saran beliau agar pedoman dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan haruslah disosialisasikan terlebih dahulu.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ipong Swardi Gultom (48 tahun) selaku guru kelas SD Negeri 173198 Pansurnatolu yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 10:00 WIB beliau mengatakan “Dalam penyelenggaraan pendidikan agama sekolah ini menggunakan pedoman yang diberikan oleh menteri agama. Adapun cara pelaksanaan pedoman pengelolaan pendidikan agama di sekolah ini sudah dijalankan semaksimal mungkin tetapi dalam hal penyelenggaraan pendidikan agama Islam memang belum dijalankan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri agama nomor 16 tahun 2010. Tidak ada pedoman lain yang digunakan dalam penyelenggaraan pengelolaan pendidikan agama disekolah ini. Dalam pelaksanaan pedoman pengelolaan pendidikan agama terdapat hambatan/kelemahan yaitu tidak adanya sosialisasi dari dinas pendidikan dan tidak adanya guru agama Islam disekolah tersebut, adapun saran beliau agar pedoman dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka kebijakan haruslah disosialisasikan terlebih dahulu.”

Sementara itu Ibu Lamria Gultom (46 tahun) selaku guru kelas dan guru pendidikan agama Kristen yang diwawancarai pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 11:00 WIB beliau mengatakan “Dalam penyelenggaraan pendidikan agama sekolah ini menggunakan pedoman yang diberikan oleh

menteri agama. Adapun cara pelaksanaan pedoman pengelolaan pendidikan agama di sekolah ini sudah dijalankan semaksimal mungkin tetapi dalam hal penyelenggaraan pendidikan agama Islam memang belum dijalankan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri agama nomor 16 tahun 2010. Tidak ada pedoman lain yang digunakan dalam penyelenggaraan pengelolaan pendidikan agama disekolah ini. Dalam pelaksanaan pedoman pengelolaan pendidikan agama terdapat hambatan/kelemahan yaitu tidak adanya sosialisasi dari dinas pendidikan dan tidak adanya guru agama Islam disekolah tersebut, adapun saran beliau agar pedoman dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka jika ada kebijakan baru maka haruslah disosialisasikan terlebih dahulu.”

Menurut Bapak Kardiman Nainggolan (36 tahun) selaku orang tua siswa yang diwawancarai pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 15:00 WIB beliau mengatakan “Dalam penyelenggaraan pendidikan agama sekolah ini menggunakan pedoman yang diberikan oleh menteri agama. Adapun cara pelaksanaan pedoman pengelolaan pendidikan agama di sekolah ini sudah dijalankan semaksimal mungkin tetapi dalam hal penyelenggaraan pendidikan agama Islam memang belum dijalankan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri agama nomor 16 tahun 2010. Tidak ada pedoman lain yang digunakan dalam penyelenggaraan pengelolaan pendidikan agama disekolah ini. Dalam pelaksanaan pedoman pengelolaan pendidikan agama terdapat hambatan/kelemahan yaitu tidak adanya sosialisasi dari dinas pendidikan dan

tidak adanya guru agama Islam disekolah tersebut, adapun saran beliau agar pedoman dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka dinas pendidikan harus mensosialisasikan peraturan ke sekolah-sekolah yang ada di Tapanuli Utara.

Hasilwawancara dengan Bapak Wahirun Nainggolan (45 tahun) selaku orang tua siswapada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 15:30 WIB beliau mengatakan “Dalam penyelenggaraan pendidikan agama sekolah ini menggunakan pedoman yang diberikan oleh menteri agama. Adapun cara pelaksanaan pedoman pengelolaan pendidikan agama di sekolah ini sudah dijalankan semaksimal mungkin tetapi dalam hal penyelenggaraan pendidikan agama Islam memang belum maksimal dijalankan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri agama nomor 16 tahun 2010. Tidak ada pedoman lain yang digunakan dalam penyelenggaraan pengelolaan pendidikan agama disekolah ini. Dalam pelaksanaan pedoman pengelolaan pendidikan agama terdapat hambatan/kelemahan yaitu tidak adanya sosialisasi dari dinas pendidikan dan tidak adanya guru agama Islam disekolah tersebut, adapun saran beliau agar pedoman dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka dinas pendidikan harus mensosialisasikan peraturan ke sekolah-sekolah yang ada di Tapanuli Utara..

Dengan demikian dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan pengelolaan pendidikan agama SD Negeri 173198 menggunakan pedoman menteri agama nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan

agama pada sekolah. Dalam pelaksanaan pedoman pengelolaan pendidikan agama Islam di sekolah ini belum dijalankan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan beberapa kendala diantaranya tidak adanya guru agama Islam di sekolah tersebut serta tidak adanya sosialisasi dari dinas pendidikan ke pihak sekolah terkait peraturan menteri agama dalam pengelolaan pendidikan agama.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di SD Negeri 173198 Pansurnatolu, maka akan diuraikan hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama yang dikategorisasikan ke dalam adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, adanya perilaku/sikap yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program kebijakan, dan adanya pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kebijakan.

a. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan pendidikan agama pada sekolah.

Tujuan dan sasaran merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dengan sumber daya yang berkualitas, dalam hal pengelolaan pendidikan agamatujuan dari kebijakan tersebut untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu di sekolah. Hal ini sesuai

dengan yang dikemukakan Agustino (2010:139) bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Tujuan dan sasaran pengelolaan pendidikan agama pada SD Negeri 173198 Pansurnatolu belum tercapai secara maksimal, dikarenakan kurangnya kuantitas tenaga pendidik agama Islam, kurangnya sarana dan fasilitas pendukung yang sesuai dengan peraturan menteri agama seperti sumber belajar, media pembelajaran, perpustakaan, dan laboratorium pendidikan agama. Hal ini didukung oleh pendapat Edward dalam Mulyadi (2016:28) bahwa sumber daya menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kuantitas maupun kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan

Hal ini dibuktikan sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 09:00 WIB dengan Bapak Sahat Simanjuntak (56 tahun) selaku Kepala Sekolah SD Negeri 173198 Pansurnatolu beliau mengatakan “Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan pendidikan agama Islam pada sekolah belum tercapai. Hal ini disebabkan oleh tidak ada guru agama Islam (sumber daya manusia) di sekolah tersebut serta kurangnya sarana dan fasilitas pendukung (sumber daya finansial)

dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan agama Islam yang bermutudi sekolah tersebut.

b. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam pengelolaan pendidikan agama pada sekolah.

Proses penyampaian informasi kebijakan dari implementor kepada kelompok sasaran kebijakan (target group). dalam pengelolaan pendidikan agama pada sekolah belum efektif. Hal ini terlihat dari tidak adanya komunikasi yang dilakukan dinas pendidikan kepada pihak SD Negeri 173198 Pansurnatolu seperti sosialisasi atau rapat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Edward dalam Mulyadi (2016:28) bahwa komunikasi kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang tidak efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).

Hal ini dibuktikan sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 09:30 WIB dengan Bapak Henri Gultom (36 tahun) selaku Tata Usaha/Operator Sekolah SD Negeri 173198 Pansurnatolu bahwa belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan terkait Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama kepada pihak sekolah sampai sekarang. Karena peraturan menteri agama tersebut belum disosialisasikan maka pihak sekolah sampai sekarang belum ada melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait.

c. Adanya perilaku/sikap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan yaitu pengelolaan pendidikan agama pada sekolah

Perilaku/sikap yang bertanggungjawab merupakan bentuk konsistensi pimpinan dalam mewujudkan atau merealisasikan kebijakan. Sikap yang bertanggung jawab pihak SD Negeri 173198 Pansurnatolu terhadap pelaksanaan kebijakan peraturan menteri agama nomor 16 tahun 2010 sudah dilakukan semampu pihak sekolah walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman atau petunjuk yang telah digariskan dalam kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dari usaha sekolah seperti melakukan pembinaan budi pekerti kepada siswa, kerjasama dengan orang tua siswa dan jika waktunya ujian maka sekolah harus meminta soal ujian dari sekolah.

Sesuai denganyang dikemukakan oleh Widodo (2011:98) bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Hal ini dibuktikan sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 10:00 WIB dengan Bapak Ipong Swardi Gultom (48 tahun) selaku guru kelas SD Negeri 173198 Pansurnatolu beliau mengatakan “usaha sekolah dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan

agama Islam dengan melakukan pembinaan budi pekerti, kerjasama dengan orangtua siswa dan jika ujian maka soal dan jawaban ujian agama Islam didapatkan dari sekolah lain.

d. Adanya pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan agama pada sekolah.

Pedoman dijadikan sebagai petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah untuk melakukan suatu kegiatan atau proses pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai dengan harapan. Hal ini sesuai dengan pendapat Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Peraturan menteri agama nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah telah dijadikan sebagai pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan kebijakan di SD Negeri 173198 Pansurnatolu. Walaupun pada kenyataannya penyelenggaraan pendidikan agama Islam belum maksimal dijalankan disebabkan beberapa hal yaitu tidak adanya sosialisasi dari dinas pendidikan terkait kebijakan peraturan menteri agama serta tidak adanya guru agama Islam di sekolah tersebut.

Hal ini dibuktikan sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 11:00 WIB dengan Ibu Lamria Gultom (46 tahun) selaku guru kelas dan guru pendidikan agama Kristen beliau mengatakan “Dalam penyelenggaraan pendidikan agama sekolah ini

menggunakan pedoman peraturan menteri agama nomor 16 tahun 2010. Adapun cara pelaksanaan pedoman pengelolaan pendidikan agama di sekolah ini sudah dijalankan semaksimal mungkin tetapi dalam hal penyelenggaraan pendidikan agama Islam memang belum dijalankan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri agama nomor 16 tahun 2010. Dalam pelaksanaan pedoman pengelolaan pendidikan agama terdapat hambatan/kelemahan yaitu tidak adanya sosialisasi dari dinas pendidikan serta tidak adanya guru agama Islam di sekolah tersebut

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti disajikan dan dibahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama Di SD Negeri 173198 Pansurnatolu, dalam pelaksanaan dari peraturan tersebut belum berjalan dengan baik.

Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yang pertama, adanya tujuan dan sasaran kebijakan peraturan menteri agama nomor 16 tahun 2010 belum sepenuhnya dijalankan atau dilaksanakan di SD Negeri 173198 Pansurnatolu sehingga penyelenggaraan pendidikan agama yang bermutu belum bisa tercapai. Hal ini dikarenakan kurangnya kuantitas tenaga pendidik agama Islam, kurangnya sarana dan fasilitas pendukung yang sesuai dengan peraturan menteri agama seperti sumber belajar, media pembelajaran, perpustakaan, dan laboratorium pendidikan agama

Kedua, adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam pengelolaan pendidikan agama pada sekolah, dalam penyampaian informasi kebijakan belum dijalankan secara maksimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya komunikasi yang dilakukan dinas pendidikan kepada pihak SD Negeri 173198 Pansurnatolu seperti sosialisasi

terkait kebijakan Peraturan Menteri Agama Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.

Ketiga, adanya perilaku/sikap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan yaitu pengelolaan pendidikan agama pada sekolah, dalam hal ini pihak sekolah sudah berusaha ikut mendukung terhadap Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 dalam penyelenggaraan pendidikan agama yang bermutu di sekolah yaitu dengan melakukan pembinaan budi pekerti kepada siswa, bekerjasama dengan orangtua siswa dan masyarakat yang beragama Islam disekitar desa Pansurnatolu.

Keempat, adanya pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan agama pada sekolah, dalam hal ini pedoman atau aturan-aturan dalam Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tersebut sudah diterapkan tetapi dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam memang belum sesuai dengan yang diamanatkan sehingga belum tercapainya penyelenggaraan pendidikan agama yang bermutu di sekolah ini. Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu tidak adanya sosialisasi dari dinas pendidikan terkait kebijakan peraturan menteri agama nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama serta tidak adanya guru agama Islam di sekolah tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 di Sekolah Dasar Negeri 173198 Pansurnatolu, hendaknya penyampaian kebijakan disosialisasikan melalui Dinas Pendidikan agar pihak-pihak terkait dapat menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan yang diamanatkan sehinggatercapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut.
2. Dalam hal pengadaan tenaga pendidik/guru agama Islam, hendaknya pemerintah dapat menugaskan Pembina Pendidikan Agama untuk mengajar pendidikan agama di Sekolah Dasar Negeri 173198 Pansurnatolu, Tapanuli Utara
3. Diharapkan adanya kerjasama dengan pihak antara pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, Sekolah Dasar Negeri 173198 Pansurnatolu, Orang tua siswa, masyarakat lingkungan sekitar Pansurnatolu untuk saling bekerjasama dalam meningkatkan kinerja masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan agama yang bermutu di sekolah tersebut.
4. Diharapkan adanya pengawasan dari Pengawas Pendidikan Agama yang melakukan pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan agama dan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait tentang penyelenggaraan pendidikan agama di Sekolah Dasar Negeri 173198 Pansurnatolu sehingga tercapai tujuan pendidikan agama dan tujuan pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012 : *Kebijakan Publik*, Salemba, Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011 : *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Agustino, Leo. 2006 : *Politik dan Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.
-,2008 : *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
-, 2010 : *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Budiarjo, Miriam. 2000 : *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Indonesia. Jakarta
- Bungin, Burhan. 2012 : *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2011 : *Pengantar Kependidikan*, Alfabeta, Bandung
- Darmadi, Hamid. 2014 : *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Alfabeta, Bandung
- Dunn, William. 2003 : *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Emzir, 2012 : *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Hasbullah.2003 : *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Islamy, Irfan.2009 : *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Majid, Abdul & Andayani, Dian.2005 : *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mustopadidjaya, AR. 2002 : *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, LAN, Jakarta
- Mulyadi, Deddy. 2016 : *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta. Bandung

- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011 :*Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Susilo, Muhammad Joko. 2007 :*Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006 :*Ilmu Admininistrasi Publik*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Tangkilisan, 2003 :*ImplementasiKebijakan Publik*, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Umar, Bukhari. 2010 :*Ilmu Pendidikan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wahab, Abdul Solihin. 2005 : *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Wahab, Abdul Solichin. 2014 :*AnalisisKebijakan :Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta
- Widodo, Joko. 2011 : *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing, Malang
- Winarno, Budi. 2012 :*Kebijakan Publik*, Caps, Yogyakarta.

Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah